

KAJIAN EKISTENSI DINASTI POLITIK TERHADAP PERFORMA INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN KLATEN

Zelika Dewi F.^{1*}, Bhimo Rizky Samudro²

1. Faculty of Economics and Business, Sebelas Maret Univesity, Indonesia
2. Faculty of Economics and Business, Sebelas Maret Univesity, Indonesia

*E-mail Korespondensi: fortunazelikadewi@gmail.com

Abstract

For almost twenty years Klaten Regency is led by political dynasty, where two couples alternately lead the regency. The problem of political dynasty will certainly have an impact on the expectation of decentralization, which is to improve the quality of social economy and governance in every region. Similarly, the political dynasty in Klaten Regency. The indicator performance of social economy in Klaten Regency can be disrupted by the existence of political dynasty. Socio-economic indicators consist of GRDP, per capita income, economic growth, inflation, HDI, poverty, corruption, income inequality and unemployment. The purpose of this study was to examine the pattern of political dynasty in Klaten Regency and the indicators performance of social economy in this regency. This study was a qualitative research by using interview technique of collecting data and literature review. Based on the result of the content analysis, it showed that the political dynasty in Klaten Regency is a single type of elite political dynasty, quasi familisme and populist typology. Besides, the pattern of social economic indicator performance is also found, where the corruption and income inequality becomes indicator with the worst performance. The improvement of political system at central and local level, review of Article 7r Law number 8 Year 2015 and political education to society needs to be improved. Besides, the participation of society and law enforcement to keep control the wheel of government that can be expected to reduce fraudulent practices in government, especially in the political dynasty government.

Keywords: Political Dynasty, Political Economics, Social Economy Indicators, Local Strongman Theory

JEL Classification: P16, P48, B55

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi yang tumbuh pada tahun 1999 menciptakan harapan baru di tiap daerah di Indonesia. Salah satu harapan tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diamati melalui kualitas sosial ekonomi dan terciptanya tatakelola pemerintahan daerah yang lebih baik (Sujarwoto, 2015). Namun seiring berjalannya waktu, timbul permasalahan-permasalahan politik yang mungkin dapat memupuskan harapan desentralisasi tersebut. Salah satunya adalah tumbuhnya dinasti politik di setiap daerah otonom. Pada awal pelaksanaan desentralisasi, para ahli politik menengarai adanya fenomena tersebut yang ditandai dengan munculnya elite-elite penguasa daerah (Hofman & Kaiser, 2002).

Salah satu daerah yang tak luput dari munculnya dinasti politik adalah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dinasti politik tumbuh di Klaten selama kurang lebih 20 tahun tentunya akan berpengaruh pula pada performa sosial dan ekonomi di Kabupaten ini. Dampak yang diberikan dapat bersifat positif maupun negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dinasti politik dan performa indikator sosial ekonomi Kabupaten Klaten selama dipimpin oleh dinasti politik. Indikator sosial ekonomi tersebut berupa IPM, kemiskinan, pengangguran, korupsi, ketimpangan pendapatan, inflasi, PDRB, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi

2. KAJIAN PUSTAKA

Dinasti Politik

Mendoza, Beja, Venida, & Yap (2013) mengatakan bahwa dinasti politik mengacu pada anggota keluarga yang menduduki posisi terpilih baik secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda. Lebih jauh lagi, dinasti politik adalah upaya para penguasa untuk meletakkan keluarga dan kerabatnya pada jabatan strategis dengan tujuan menjaga kekuasaan dinasti yang dibangun. Djati (2013) mengatakan bahwa dalam setiap pembahasan dinasti politik akan selau melekat budaya politik familisme tidak dapat dilepaskan. Varian budaya politik familisme dalam dinasti politik dapat dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 1. Varian Budaya Familisme Dinasti Politik di Indonesia

Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
Dasar Pembentukan	Hubungan darah langsung	Hubungan afeksi, kepercayaan, dan solidaritas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan kroni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (<i>hereditary</i>)	Keluarga inti
Sifat	Tertutup	Semi Tertutup	Tertutup

Sumber: Djati (2013)

Selain itu Djati (2013) juga menjelaskan bahwa dalam dinasti politik terdapat jejak budaya politik familisme yang akan menentukan pemetaan kekuasaan dinasti tersebut. Pemetaan kekuasaan ini dianggap penting untuk mengetahui karakteristik bangunan dinasti politik di setiap daerah. Pemetaan ini selanjutnya akan membentuk tipologi, Terdapat empat tipologi preferensi familisme dalam dinasti politik lokal yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

Table 2. Tipologi Dinasti Politik di Indonesia

Jenis Tipologi	Dasar Pembentukan	Karakter	Contoh Kasus
Populis	Figur merakyat dan program populis, menjaga <i>status quo</i> , dibentuk by incident	Semi-terbuka, populis dan kuasi-otoritan	Kabupaten Klaten, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kendal dan Indramayu
Jejaring Kuasa Informal	Patrimonialisme, kharismatik figur, sinergi aktor formal dan informal	Tertutup, Oligarkis, Semi-Demokrasi	Banten
Tribalisme	Reproduksi ritus-ritus budaya etnis, ikatan primordialisme, klan politik dan stratifikasi sosial	Tertutup, patrimonialistik	Sulawesi Utara dan Papua
Feodalisme	Kesejarahan, berstatus mantan kerajaan	Tertutup dan patrimonialistik	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali

Sumber: Djati (2013)

Tipologi dalam konteks ini juga untuk memberikan telaah mengenai kecenderungan politis yang menjadi dominan dalam membentuk pemerintahan dinasti. Selain itu, tipologi ini dapat menjelaskan dasar terbentuk dan karakter sebuah dinasti politik.

Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah salah satu pendekatan di ilmu ekonomi yang mempercayai bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi seseorang (Yustika, 2009). Menurut Samudro (2010) prinsip-prinsip ekonomi politik menawarkan cara untuk memeriksa keterkaitan heterogen antara faktor ekonomi, sosial dan politik. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi politik akan cocok digunakan untuk melihat hubungan antara dinasti politik dan performa sosial ekonomi di suatu daerah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi politik terbagi menjadi beberapa prinsip, diantaranya adalah *historis*, *coreperiphery*, *circular cumulative causation*, dan *contradiction*.

Teori Local Strongman

Teori orang kuat lokal, dalam istilah lain sering disebut *local strongmen*. Pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang penting seperti tanah, kredit dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat.

Fenomena orang kuat lokal tidak bisa dipisahkan dari istilah *stationary bandits* dan *roving bandits*. Ketiganya merupakan unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Olson (2000) dalam Agustino (2011) *stationary bandits* tidak akan menguras habis kekayaan yang berada di daerah kekuasaannya. Ia bahkan akan memberikan ruang bagi patron dan *local strongman*-nya untuk beraktivitas seperti biasa

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Indiarto & Supomo, 2002). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat atau deskripsi, gambar-gambar, dan grafik secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1985).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Untuk memperoleh gambaran dan data penelitian yang tepat dan komprehensif, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi dan isi dari komunikasi tersebut (Bungin, 2008).

Selain menggunakan teknik analisis isi, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis *cross-tab*. Definisi metode analisis *crossstab* diungkapkan Santoso (2004), bahwa analisis *crossstab* merupakan metode untuk menganalisis keterkaitan variabel-variabel yang disusun menjadi kolom dan baris

Penelitian ini menggunakan analisis *Crosstab* bertujuan untuk melengkapi dan mempertajam hasil analisis deskriptif. Sitepu (1994) menyatakan metode analisis *Crosstab* merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi cukup kuat dalam menerangkan hubungan antar variabel.

Pola keterkaitan monopoli ekonomi terhadap indikator sosial dan monopoli sosial terhadap indikator ekonomi cukup dilihat dari indikator nilai *Chi-Square* yang digambarkan melalui tabel. Nilai *Chi-Square* hitung yang muncul akan dibandingkan nilai *Chi-Square* tabel. Nilai *Chi-Square* hitung yang lebih kecil dari nilai *Chi-Square* tabel menggambarkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel baris dan kolom atau pada penelitian ini menunjukkan tidak ada keterkaitan yang kuat antara monopoli ekonomi terhadap indikator sosial dan monopoli sosial terhadap indikator ekonomi begitu pula sebaliknya.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Performa Indikator Sosial Ekonomi Setiap Periode Bupati

Terdapat pola performa indikator yang konsisten dan tidak konsisten di setiap periode pemerintahan bupati di Kabupaten Klaten. Indikator-indikator yang memiliki pola yang konsisten di setiap periodenya adalah PDRB, IPM, kemiskinan, dan korupsi. Di mana PDRB, IPM, dan kemiskinan memiliki tren yang positif di setiap periode. Sebaliknya, korupsi mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini berarti negatif karena penyelewengan kekuasaan di setiap periode akan semakin tinggi.

Pada periode pemerintahan Haryanto Wibowo, indikator-indikator yang memiliki kinerja yang baik adalah PDRB, pertumbuhan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan. Kelima indikator tersebut menunjukkan tren yang positif, di mana PDRB, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan IPM mengalami tren yang meningkat dan kemiskinan mengalami tren menurun.

Sedangkan indikator yang memiliki pola-pola yang tidak konsisten di setiap periodenya adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita, inflasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain inflasi, pengangguran, korupsi, dan ketimpangan pendapatan memiliki kinerja yang buruk, di mana keempat tersebut mengalami tren yang meningkat pada periode pemerintahan Haryanto Wibowo

Table 3. Kinerja Indikator Sosial Ekonomi Setiap Periode

Indikator	Kinerja Periode Haryanto Wibowo dan Wisnu Harsono	Kinerja Periode Sunarna-Samiadji	Kinerja Periode Sunarna-Sri Hartini	Kinerja Periode Sri Hartini dan Sri Mulyani
Produk Domestik Regional Bruto	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Pertumbuhan Ekonomi	Meningkat	Tetap	Meningkat	Meningkat
Pertumbuhan Pendapatan per Kapita	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun
Inflasi	Meningkat	Tetap	Menurun	Menurun
Indeks Pembangunan Manusia	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Kemiskinan	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Penagangguran	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Korupsi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Ketimpangan Pendapatan	Meningkat	Landai, cenderung menurun	Meningkat	Meningkat

Sumber: Data diolah

Sedangkan pada periode pemerintahan Sunarna dan Samiadji, indikator yang memiliki kinerja yang baik adalah PDRB, IPM, kemiskinan, dan pengangguran. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, indikator yang memiliki kinerja yang baik tentunya me-

nurun jumlahnya. Karena pada periode ini, indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ketimpangan pendapatan bergerak tidak stabil setiap tahunnya sehingga tren yang tercipta adalah landai dan termasuk kedalam indikator dengan kinerja sedang. Pertumbuhan pendapatan per kapita dan korupsi merupakan indikator dengan kinerja terburuk pada periode ini, di mana pertumbuhan pendapatan per kapita mempunyai tren yang menurun dan korupsi memiliki tren yang meningkat.

Tujuh dari sembilan indikator pada periode Sunarna dan Sri Hartini memiliki kinerja yang baik, sedangkan dua indikator dengan kinerja terburuk adalah korupsi dan ketimpangan pendapatan. Bila dibandingkan dengan dua periode sebelumnya, periode ini merupakan periode terbaik selama dinasti politik berlangsung.

Periode terakhir, yaitu periode pemerintahan Sri Hartini dan Sri Mulyani. Namun pada periode ini kita hanya akan melihat kinerja indikator sosial ekonomi pada tahun pertama pemerintahan dua srikandi ini, yaitu pada tahun 2016. Karena pada akhir tahun 2016, bupati Sri Hartini ditangkap tangan oleh KPK karena kasus suap jual beli jabatan yang menjaturnya dan beberapa pihak di pemerintahan Kabupaten Klaten.

Indikator-indikator yang memiliki kinerja baik pada tahun ini adalah PDRB, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan. Sedangkan kelima indikator lainnya termasuk dalam kinerja yang buruk.

Performa Indikator Sosial Ekonomi Selama Pemerintahan Dinasti Politik

Selama tujuh belas tahun dipimpin oleh dua pasang suami istri secara berturut-turut, kinerja indikator sosial ekonomi di Kabupaten Klaten memiliki kinerja yang berbeda-beda. Dimulai dari indikator ekonomi. Indikator yang pertama adalah PDRB atas dasar harga konstan yang memiliki performa yang baik karena memiliki tren yang meningkat. Hal serupa juga dialami oleh indikator pertumbuhan ekonomi, karena memiliki tren yang meningkat pula. Namun, hal ini tidak diikuti oleh indikator selanjutnya, yaitu pertumbuhan pendapatan per kapita, indikator ini memiliki kinerja yang cukup stagnan. Di mana tren yang terbentuk adalah landai namun cenderung menunjukkan peningkatan. Tren yang landai cenderung menunjukkan data yang bergerak begitu fluktuatif, atau dapat dikatakan data bergerak dari titik minimal hingga titik maksimal di tiap tahunnya. Indikator inflasi, juga mengikuti jejak indikator pertumbuhan pendapatan perkapita yaitu memiliki kinerja yang cukup baik, karena memiliki tren yang landai dan cenderung menurun. Hal ini juga mengindikasikan bahwa inflasi di Kabupaten Klaten kurang stabil.

Indikator sosial juga memiliki kinerja yang berbeda-beda, untuk Indeks Pembangunan Manusia memiliki kinerja yang baik karena tren yang dihasilkan meningkat. Begitu juga dengan indikator kemiskinan memiliki kinerja yang baik karena memiliki tren yang menurun. Sehingga jumlah penduduk miskin pun cenderung berkurang. Namun kinerja IPM dan kemiskinan tidak diikuti oleh indikator penanggungan, karena tren yang terbentuk pada indikator ini adalah landai dan cenderung meningkat, hal ini menandakan bahwa pada setiap tahunnya, pergerakan penanggungan di Kabupaten ini tidak stabil.

Tren yang kurang memuaskan terjadi pada indikator korupsi di mana tren yang terbentuk menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan jumlah penyalahgunaan kekuasaan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Prestasi buruk juga didapatkan oleh indikator ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini, karena tren yang tercipta menunjukkan tren yang terus meningkat, hal ini tentunya tidak baik bagi Kabupaten Klaten karena pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Analisa Crosstab: Monopoli Kekuasaan dan Kekayaan dalam Bingkai Dinasti Politik

Hasil analisis deskriptif pada bahasan sebelumnya akan dipertajam dengan hasil analisis *crosstab*. Pada hasil analisis *Crosstab* ini juga akan menghasilkan nilai *Chi-Square*

yang menunjukkan ada atau tidaknya pola keterkaitan monopoli kekuasaan dengan faktor sosial dan monopoli ekonomi dengan faktor sosial. Monopoli kekuasaan akan diwakili oleh indikator korupsi yang diasumsikan merupakan output dari monopoli kekuasaan. Sedangkan output dari monopoli ekonomi diasumsikan adalah indikator pertumbuhan ekonomi.

Table 4. Hasil Analisis *Crostab* Monopoli Kekuasaan dengan Indikator Ekonomi

		PDRB			Pertumbuhan Ekonomi			Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita			Inflasi		
		L	S	K	L	S	K	L	S	K	L	S	K
Monopoli	Count	5	4	8	5	7	5	4	8	5	5	7	5
	Persentase (%)	29,4	23,5	47,1	29,4	41,2	29,4	23,5	47,1	29,4	29,4	41,2	29,4

Keterangan, L = Lemah, S = Sedang, k= Kuat
 Sumber: SPSS 2016

Jika nilai *Chi-Square* hitung lebih kecil dari nilai Tabel atau nilai *Asymptotic significance* lebih besar dari alpha 5% (0,05) maka menunjukan tidak ada hubungan atau keterkaitan antara monopoli kekuasaan dengan indikator ekonomi. *Alpha* yang digunakan adalah sebesar 5% dan *Chi Square* Tabel sebesar 23,69 karena nilai df yang dihasilkan adalah 14. Pada indikator PDRB, nilai *Chi-Square* hitung adalah 16,292 sehingga nilai *Chi-Square* lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* Tabel. Nilai *asymptotic significance* pada indikator ini sebesar 0,296. Sehingga monopoli kekuasaan tidak menunjukkan hubungan dengan indikator PDRB dan sebaliknya.

Pada indikator pertumbuhan ekonomi, nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 16,433 dengan nilai *Chi-Square* Tabel sebesar 23,69. Nilai *asymptotic significance* pada indikator ini sebesar 0,288. Sehingga indikator pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *Chi-Square* hitung lebih kecil dari nilai Tabel atau nilai *Asymptotic significance* lebih besar dari alpha 5% (0,05). Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan antara monopoli kekuasaan dan indikator pertumbuhan ekonomi.

Indikator pertumbuhan pendapatan perkapita memiliki nilai *Chi-Square* hitung sebesar 14,025 dengan nilai *Chi-Square* tabel sebesar 23,69. Serupa dengan dua indikator sebelumnya, indikator pertumbuhan pendapatan per kapita juga menunjukkan tidak ada keterkaitan dengan monopoli kekuasaan.

Hal serupa juga diikuti oleh indikator inflasi, karena nilai dari *Chi-Square* hitung (13,294) lebih kecil dibandingkan *Chi-Square* Tabel (23,69). Selain itu nilai *Asymptotic significance* indikator ini adalah sebesar 0,455, sehingga lebih besar dari nilai Alpha (0,05).

Pada analisis *Crosstab* tidak hanya nilai *Chi-Square* dan *Asymp. Sig* saja yang dapat menunjukan keterkaitan atau hubungan, tetapi pada tabulasi antara monopoli kekuasaan dan indikator ekonomi juga dapat menggambarkan pola yang terjadi.

Table 5. Hasil Analisis *Crostab* Monopoli Ekonomi dengan Indikator Sosial

		Prsnt.Pnddk Miskin			Ind. Gini			Korupsi			IPM			Pengangguran		
		L	S	K	L	S	K	L	S	K	L	S	K	L	S	K
M.Ekonomi	Count	5	7	5	5	6	6	5	4	8	5	4	8	6	7	4
	Prsnt (%)	29,4	41,2	29,4	29,4	36,3	36,3	29,4	23,5	47,1	29,4	23,5	47,1	36,3	41,2	23,5

Keterangan, L = Lemah, S = Sedang, k= Kuat
 Sumber: SPSS 2016

Hasil uji *Chi-Square* pada monopoli ekonomi dan indikator sosial menunjukkan nilai χ^2 sebesar 30, sehingga nilai *Chi Square* tabel adalah 43,77. Apabila nilai *Chi-Square* hitung indikator- dan ekonomi ternyata tidak memiliki kaitan terhadap indikator sosial ekonomi jika dilihat melalui uji *Chi-Square*, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan mengapa suatu indikator memiliki kinerja yang lemah, sedang hingga kuat.

Temuan Penelitian

Setiap indikator sosial ekonomi di Kabupaten Klaten memiliki kinerjanya masing-masing. Setiap kinerja indikator ini jika dikaitkan dengan teori terangkum dalam matriks berikut:

Table 6. Matriks Temuan Penelitian

No	Indikator Sosial Ekonomi	Hasil Penelitian	Kaitan dengan Teori
1.	PDRB Konstan	Selama dipimpin oleh dinasti politik, indikator PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pola yang meningkat.	Tidak berkaitan kuat dengan teori apapun tetapi menunjukkan fenomena atau pola yang baru.
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Selama dikuasai oleh dinasti politik indikator pertumbuhan ekonomi menunjukan pola yang meningkat.	Fenomena ini bertolak belakang dengan penelitian Braganca, Ferraz, dan Rios (2015) yang mengatakan bahwa dinasti politik tidak membawa perbaikan pada pertumbuhan ekonomi.
3.	Pertumbuhan pendapatan per kapita	Selama dikuasai oleh dinasti politik, pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang landai namun cenderung mengalami peningkatan.	Tidak berkaitan kuat dengan teori apapun tetapi menunjukkan fenomena atau pola yang baru.
4.	Inflasi	Selama dikuasai oleh dinasti politik, inflasi di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang landai namun cenderung mengalami penurunan.	Tidak berkaitan kuat dengan teori apapun tetapi menunjukkan fenomena atau pola yang baru.
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Selama dikuasai oleh dinasti politik IPM di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang meningkat.	Tidak berkaitan kuat dengan teori apapun tetapi menunjukkan fenomena atau pola yang baru.
6.	Kemiskinan	Selama dikuasai oleh dinasti politik, kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang menurun	Fenomena ini berlawanan dengan hasil penelitian dari Sujarwoto (2015), dimana dinasti politik membawa pengaruh buruk terhadap kemiskinan.
7.	Pengangguran	Pengangguran di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang landai namun cenderung menurun selama dikuasai oleh dinasti politik	Tidak berkaitan kuat dengan teori apapun tetapi menunjukkan fenomena atau pola yang baru.
		Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang meningkat, tapi hal ini tidak dibarengi dengan menurunnya jumlah pengangguran, karena jumlah pengangguran masih berfluktuasi setiap tahunnya.	Fenomena ini berkaitan dengan teori Iqbal (2011) tentang pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat disekitar maupun di dalamnya.

8.	Korupsi	Korupsi di Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang meningkat selama dikuasai oleh dinasti politik	Fenomena ini sesuai dengan penelitian Hasibuan, 2013; dan Mendoza, 2012 bahwa menguatnya dinasti politik berdampak pula pada besarnya potensi korupsi yang dilakukan para anggota
		PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM memiliki pola yang meningkat namun tidak diimbangi dengan menurunnya tingkat korupsi.	Keadaan seperti ini berlawanan dengan prinsip CCC dari Myrdal (1968) tentang kesejahteraan dan budaya serta moral yang baik akan menekan konflik sosial yang terjadi. Selain itu fenomena ini sejalan dengan penelitian Supono (1989) dan Iqbal (2011), ketika pembangunan tidak memberikan dampak positif yang maksimal terutama kesejahteraan maka yang muncul adalah konflik sosial.
9	Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan pendapatan Kabupaten Klaten yang diukur melalui indeks gini menunjukkan pola yang meningkat selama dikuasai oleh dinasti politik	Fenomena ini sejalan dengan teori ketergantungan milik Andre Gunder Frank, dimana semakin tinggi kekuasaan <i>core</i> maka ketimpangan akan semakin tinggi

Sumber: Data diolah

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertama, terdapat pola performa indikator yang konsisten dan tidak konsisten di setiap periode pemerintahan bupati di Kabupaten Klaten. Indikator-indikator yang memiliki pola yang konsisten di setiap periodenya adalah PDRB, IPM, kemiskinan, dan korupsi. Dimana PDRB, IPM, dan kemiskinan memiliki tren yang positif di setiap periode.

Sebaliknya, korupsi mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini berarti negatif karena penyelewengan kekuasaan di setiap periode akan semakin tinggi.

Sedangkan indikator yang memiliki pola-pola yang tidak konsisten di setiap periodenya adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita, inflasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Kedua, selama berlangsungnya dinasti politik di Kabupaten Klaten, indikator-indikator yang memiliki pola yang baik (tren positif) adalah PDRB, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan. Sedangkan indikator yang memiliki pola sedang (garis tren landai) adalah pertumbuhan pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran.

Indikator-indikator yang memiliki pola terburuk adalah korupsi dan ketimpangan pendapatan. Indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, namun hal tersebut tidak disertai dengan penurunan jumlah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan dinasti politik kurang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat umum.

Ketiga, dinasti politik di Kabupaten Klaten merupakan dinasti politik dengan tipe elite tunggal, dimana elite berkuasa secara prismatic. Jika dilihat dari varian budaya familisme, dinasti politik di Kabupaten Klaten merupakan dinasti politik dengan varian quasi familisme di mana dimensi politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi

telah bercabang dengan keluarga lainnya. Sedangkan menurut tipologi kekuasaannya, dinasti politik di Kabupaten Klaten merupakan jenis dinasti politik populis.

Saran

Dinasti politik tidak bisa dilarang, karena merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Namun monopoli kekuasaan dan ekonomi tentunya tidak dapat terus dilegalkan. Maka dari itu, perlu peran serta seluruh komponen bangsa untuk mencegah dinasti politik.

Bagi pemerintah, diperlukan pengkajian ulang Pasal 7r, UU No. 8 Tahun 2015, karena dengan adanya pasal tersebut pencalonan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan keluarga petahana akan berkurang.

Salah satu penyebab tumbuhnya ekonomi informal antara dinasti politik dan elite bisnis adalah karena ketidakmandirian finansial dari sisi partai politik, sehingga partai politik akan cenderung mencari bantuan dari pihak ketiga. Pemerintah pusat disarankan untuk memberikan dana lebih kepada partai politik dengan catatan partai politik bersedia diaudit oleh BPK dan semakin meningkatkan profesionalitas dalam rekrutmen dan kaderisasi.

Pengkajian ulang sistem politik, terutama pilkada langsung. Karena biaya politik yang begitu tinggi sehingga hanya kaum elite yang dapat masuk dalam persaingan pilkada. Selain itu, mahalannya biaya politik dipilkada juga menyebabkan maraknya praktik ekonomi informal dimasa jabatan petahana.

Bagi partai politik, diperlukan perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik, pada tahap rekrutmen dan kaderisasi partai politik sebaiknya melihat secara lebih profesional, sistem ini dilakukan dengan melihat kinerja dan *track record* seseorang. Tidak sebatas pada kedekatan atau kekerabatan.

Kode etik dan kode perilaku dalam internal partai, masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Partai politik harus lebih memperhatikan profesionalitas dan kompetensi kader dalam kenaikan jenjang jabatan di internal partai.

Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat perlu ditingkatkan mulai dari usia dini sampai lanjut usia, dengan ditingkatkannya pendidikan politik ini masyarakat diharapkan lebih peduli dengan sistem politik di Indonesia dan dalam pemilihan umum lebih peduli lagi dengan calon-calon pemimpin mereka. Selain itu, perlu ditegaskan kepada masyarakat agar mereka bersedia menolak praktik-praktik *money politics*.

Selain peningkakan pendidikan politik kepada masyarakat, masyarakat juga wajib mengawal jalannya pemerintahan di daerah mereka. Masyarakat diharapkan lebih peduli, aktif dan kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2011). *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(2), 203–231. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2002). The Making of the Big Bang and its Aftermath: A Political Economy. *Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?* Atlanta, Georgia.
- Indiarto, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1). Yogyakarta: BPPFE

Yogyakarta.

- Mendoza, R. U., Beja, E. L. J., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political Dynasties and Poverty: Evidence of Linkages in the Phippines. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>
- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian*. Bandung: Grafika Indonesia.
- Samudro, B. R. (2010). Political Economy of Uneven Regional Development and Local Election in Indonesia. *10th International Conference Indonesian Regional Science Association*. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=1686608>
- Santoso, S. (2004). *SPSS versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sitepu, N. S. (1994). *Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Unit Pelayanan Statistika FPMIPA, Universitas Padjajaran.
- Sujarwoto. (2015). Desentralisasi, Dinasti politik dan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.1>
- Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.